

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN
PEMELIHARAAN KESEHATAN
DI PT.PLN (PERSERO) UNIT INDUK PEMBANGKITAN
SUMATERA BAGIAN SELATAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat S-1
Ilmu Administrasi Publik**



Oleh:

**JOKO SASMIKO
07011381621100**

Konsentrasi Kebijakan Publik

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2020**

Kata Pengantar

Segala puji serta syukur kami ucapkan kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan kesehatan jasmani dan rohani, sehingga pada kesempatan ini dapat terselesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pemeliharaan Kesehatan Di PT.PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan” guna untuk menyelesaikan Pendidikan sarjana S-1 program studi Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Sriwijaya.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu, Ayah, dan Segenap seluruh keluarga yang tidak pernah berhenti memberikan doa serta dorongan semangat dari awal hingga selesainya skripsi ini. Tidak lupa juga diucapkan terima kasih banyak pada teman-teman mahasiswa yang telah memberikan dorongan moril dan material serta informasi. Kemudian dengan segala hormat diucapkan juga banyak terima kasih pada bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya sehingga dalam hal ini dapat menerapkan ilmu yang diberikan. Ucapan terima kasih ini dipersembahkan kepada:

1. Kedua orangtua saya bapak Maryono dan ibu Yati beserta keluarga besar
2. Bapak Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos, MPA selaku Ketua Jurusan Program Studi Ilmu Administrasi Negara.
4. Ibu Dwi Mirani, S.IP. M.Si selaku selaku Dosen Pembimbing II saya yang telah memberikan bimbingan, arahan serta dukungan yang luar biasa selama penulisan skripsi.
5. Bapak Drs. H. Joko Siswanto M.Si selaku Dosen Pembimbing selaku selaku Dosen Pembimbing I saya yang telah memberikan bimbingan, arahan serta dukungan yang luar biasa selama penulisan skripsi.

6. Bapak Darmawan selaku asisten manajer sumber daya manusia dan administrasi PT.PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan yang telah membantu dalam dukungan menyelesaikan skripsi.
7. Bapak Sandy Wijaya selaku Subbagian Remunerasi dan Benefit yang telah membimbing dan memberikan arahan selama penulisan skripsi berlangsung.
8. Para staf dan pegawai di PT.PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan terkhusus Bagian Administrasi SDM yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi.
9. Segenap keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) komisariat Unsri Palembang
10. Sahabatku Semenjak SMA (Agry Leofany, Ilham Try Satria, Satria Marcelino, Tri Hariyanto, Ahmad Fanzuri, M Rizky Wahyudi, M Agung Rizki)

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dengan segala kekurangannya. Untuk itu permohonan maaf serta mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan dari skripsi yang ada. Akhir kata dalam harapan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi, instansi serta pembaca untuk membantu pengembangan ilmu pengetahuan.

HALAMAN PERSETUJUAN.

Skripsi dengan judul *"Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pemeliharaan Kesehatan Di PT.PLN (persero) Unit Induk Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan"* telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tanggal 11 Agustus 2020.

Palembang, 11 Agustus 2020

Ketua

1. Drs. H. Joko Siswanto, M.Si.
NIP. 195706051985031003

Anggota

2. Dwi Mirani, S.IP M.Si.
NIP. 198106082008122002
3. Dr. M. Husni Thamrin, M.Si.
NIP. 196406061992031001
4. Dr. Nengyanti, M.Hum
NIP. 196704121992032002

Mengetahui,
Dekan FISIP

Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si
NIP. 196311061990031001

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik

Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002

**SURAT KETERANGAN PENGECEKAN
SIMILARITY**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Joko Sasmiiko
Nim : 07011981621100
Prodi : Ilmu Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial Ilmu Politik

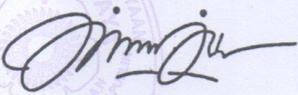
Menyatakan bahwa benar hasil pengecekan similarity Skripsi/Tesis/Disertasi/Lap.
Penelitian yang berjudul ^{Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan} ~~Pemeliharaan Kesehatan di Pt. PLM (Perum)~~ adalah 25 %. Dicek
oleh operator *: 1. Dosen Pembimbing
Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Selatan

② UPT Perpustakaan

3. Operatur Fakultas.....

Demikianlah surat keterangan ini saya buat dengan sebenarnya dan dapat saya pertanggung
jawabkan.

Menyetujui
Dosen pembimbing,



Nama: Zailani, Surya Marpaung S.Sos M.PA
NIP: 19810827 2009 121002

Indralaya, 05 Oktober..2020

Yang menyatakan,



Nama: Joko Sasmiiko
NIM: 07011981621100

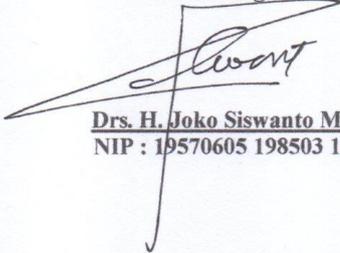
*Lingkari salah satu jawaban tempat anda melakukan pengecekan Similarity

ABSTRAK

Berdasarkan Keputusan Direksi No. 168.K/DIR/2011, tanggal 10 November 2011 tentang pemeliharaan kesehatan pegawai PT.PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Sumatera bagian selatan Guna mempermudah perusahaan dalam memantau kesehatan setiap anggota perusahaannya, kini PLN mulai menerapkan program pemeliharaan kesehatan sistem online untuk merekam riwayat kesehatan pegawai Dengan sistem ini PLN secara real time dapat mengakses data kesehatan pegawai dan keluarga pegawai terdaftar dengan tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi kebijakan Penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan di PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan. Penelitian ini termasuk dalam penelitian dengan perspektif kebijakan publik dengan menggunakan teori dari Ripley Dan Franklin, Teori Ripley dan Franklin ingin menekankan tingkat kepatuhan para implementor kebijakan terhadap isi kebijakan yang ada, pada tahap selanjutnya melihat kelancaran pelaksanaan rutinitas fungsi, serta seberapa besar masalah yang dihadapi dalam implementasi pada akhirnya juga setelah semua berjalan maka akan terwujud kinerja yang baik. Subjek penelitian ini adalah Asisten Manajer Sub Bagian Administrasi Sumber daya manusia PT. PLN (Persero Unit Induk Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan) , Junior Officer Remunerasi dan Benefit PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan, pegawai tetap PT. PLN (Persero Unit Induk Pembangkitan Sumatera Bagian serta beberapa informan pendukung lain nya yang dianggap relevan dengan penelitian tersebut . Teknik pengumpulan data digunakan dengan Wawancara terbuka dan observasi kedua teknik tersebut ini juga digunakan untuk mengetahui data tentang bagaimana implementasi program penyelenggaraan pemeliharaan Kesehatan di PT.PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan berjalan Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan implementasi kebijakan penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan di PT.PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan sudah berjalan dengan baik tetapi dalam teori yang digunakan dalam perspektif tingkat kepatuhan masih ada pemahaman *pihak implementor dan target group* yang perlu dilakukan sosialisasi dan dari perspektif hambatan masih ada perlu nya evaluasi tentang sistem yang berlaku.

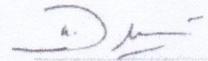
Kata Kunci : Kebijakan Publik , Kebijakan Penyelenggaraan Kesehatan

Pembimbing I



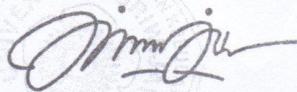
Drs. H. Joko Siswanto M.Si
NIP : 19570605 198503 1 003

Pembimbing II



Dwi Mirani S.IP M.Si
NIP : 19810608 200812 2 002

Palembang, Agustus 2020
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Universitas Sriwijaya



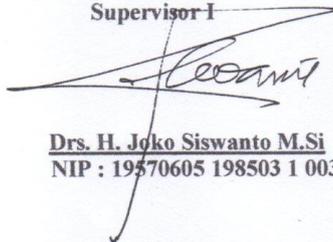
Zailani Surya Marpaung S.Sos., MPA
NIP. 19810827200912100

ABSTRACT

Based on Board of Directors Decree No. 168.K/DIR/2011, dated November 10, 2011 on the health maintenance of employees PT.PLN (Persero) South Sumatra Generation Master Unit To make it easier for the company to monitor the health of each member of its company, PLN has now begun implementing an online system health maintenance program to record the health history of employees With this system PLN in real time can access the health data of employees and families of registered employees with the purpose of this research aims to know the implementation of health maintenance implementation policy at PT. PLN (Persero) South Sumatra Generation Master Unit. This research is included in the study with a public policy perspective using theories from Ripley and Franklin, Ripley and Franklin Theory want to emphasize the level of compliance of policy implementors to the content of existing policies, at a later stage look at the smooth implementation of function routines, as well as how much problems faced in implementation in the end as well after all running will manifest good performance and achieve desired goals (impacts). The subjects of this study are Assistant Manager of Human Resources Administration Sub-Section of PT. PLN (South Sumatra Generation Master Unit Company) , Junior Officer remuneration and Benefit of PT. PLN (Persero) South Sumatra Generation Master Unit, permanent employee of PT. PLN (Persero) Main Unit of Sumatra Generation Section and several other supporting informants who are considered relevant to the research. Data collection techniques are used with open interviews and observations of the two techniques are also used to find out the data on how the implementation of health maintenance program in PT. PLN (Persero) South Sumatra Generation Master Unit. The results of the study showed the implementation of the health care policy in PT. PLN (Persero) South Sumatra Generation Master Unit is already doing well but in the theory used in the perspective of compliance level there is still an understanding of implementors and target groups that need to be socialized and from the perspective of obstacles there is still the need for evaluation of the applicable system

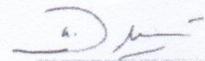
Key Word : Public Policy , Health Care Policy

Supervisor I



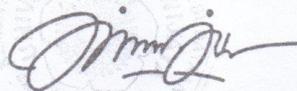
Drs. H. Joko Siswanto M.Si
NIP : 19570605 198503 1 003

Supervisor II



Dwi Mirani S.IP M.Si
NIP : 19810608 200812 2 002

Palembang, August 2020
Head of Department, Public Administration
Sriwijaya University



Zailani Surya Marpaung S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
LEMBAR PERSETUJUAN.....	4
SURAT KETERANGAN SIMILARTIY	5
ABSTRAK.....	6
DAFTAR TABEL.....	11
DAFTAR GAMBAR	12
BAB 1 PENDAHULUAN.....	13
LATAR BELAKANG MASALAH	13
RUMUSAN MASALAH.....	19
TUJUAN PENELITIAN	19
MANFAAT PENELITIAN.....	20
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	21
2.1 LANDASAN TEORI.....	21
2.1.1 TEORI KEBIJAKAN PUBLIK	23
2.1.2 TEORI FAKTOR IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK	23
2.1.3 TEORI PROSES KEBIJAKAN PUBLIK	24
2.1.4 TEORI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK.....	24
2.1.5 TEORI PELAYANAN KESEHATAN	25
2.1.6 PROSEDUR PELAYANAN KESEHATAN DI PT.PLN (PERSERO) UNIT INDUK PEMBANGKITAN SUMATERA BAGIAN SELATAN	27
2.1.7 ALUR RESTITUSI BIAYA KESEHATAN	29

2.1.8 TUJUAN KESEHATAN PEGAWAI DAN PENSIUNAN	30
2.2 TEORI YANG DIGUNAKAN.....	32
2.3 PENELITIAN TERDAHULU	34
2.4 KERANGKA PEMIKIRAN	36
BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN	37
3.1 JENIS PENELITIAN.....	37
3.2 DEFINISI KONSEP	38
3.3 FOKUS PENELITIAN	39
3.4 JENIS DAN SUMBER DATA	39
3.5 INFORMAN PENELITIAN	40
3.6 TEKNIK PENGUMPULAN DATA	41
3.7 TEKNIK ANALISIS DATA.....	42
3.8 JADWAL PENELITIAN	44
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN	45
4.1 GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	45
4.1 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
4.2.1 <i>COMPLIANCE</i> (TINGKAT KEPATUHAN)	51
4.2.2 PEMAHAMAN IMPLEMENTOR.....	52
4.2.3 PERILAKU IMPLEMENTOR	55
4.2.4 LANCARNYA RUTINITAS FUNGSI.....	78
4.2.5 FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN DAN HAMBATAN DALAM PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMELIHARAN KESEHATAN DI	

PT.PLN (PERSERO) UNIT INDUK PEMBANGKITAN SUMATERA	
BAGIAN SELATAN	80
4.2.6 IMPLEMENTASI PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMELIHARAAN	
KESEHATAN DI PT.PLN (PERSERO) UNIT INDUK PEMBANGKITAN	
SUMATERA BAGIAN SELATAN	83
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN	86
5.1 KESIMPULAN	86
5.2 SARAN	88
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN	91

DAFTAR TABEL

TABEL 1	16
TABEL 2	17
TABEL 3	31
TABEL 4	36
TABEL 5	40
TABEL 6	46
TABEL 7	76
TABEL 8	79

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.....	29
GAMBAR 2.....	43
GAMBAR 3.....	47
GAMBAR 4.....	49
GAMBAR 5.....	66
GAMBAR 6.....	69
GAMBAR 7.....	70
GAMBAR 8.....	71
GAMBAR 9.....	72
GAMBAR 10.....	82

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang masalah

Menurut Undang-undang Dasar 1945 pasal 28 H dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan menetapkan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis

Menurut Depkes RI Kesehatan RI Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 (2003:3),

“Pembangunan Kesehatan diarahkan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia dan lingkungan yang saling mendukung dengan menggunakan pendekatan paradigma sehat yaitu suatu pandangan baru dalam bidang kesehatan yang memberikan prioritas pada upaya peningkatan kesehatan, pencegahan, penyembuhan, pemulihan dan rehabilitasi sejak dalam kandungan sampai usia lanjut. Selain itu pembangunan bidang kesehatan juga diarahkan untuk meningkatkan dan memelihara mutu lembaga pelayanan kesehatan melalui pemberdayaan sumber daya manusia secara berkelanjutan, dan sarana prasarana dalam bidang medis, termasuk ketersediaan obat yang dapat dijangkau oleh masyarakat”.

Kebutuhan akan kesehatan karyawan baik untuk dirinya sendiri atau untuk keluarganya tidak hanya melihat dari keakuratan terapi yang diharapkan akan tetapi kemudahan akses, kenyamanan, pelayanan yang menyenangkan dan kecanggihan alat sudah menjadi pilihan sebagian karyawan. Menurut konsep H.L BLUM dalam website resmi kemenkes RI (1974) “Untuk mewujudkan keadaan sehat tersebut banyak hal yang perlu dilakukan salah satu diantaranya yang dinilai mempunyai peranan yang cukup penting adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan”.

Dalam Undang Undang RI NO 40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial, Menetapkan juga bahwa Jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan

prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas, Jaminan kesehatan diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Manfaat jaminan kesehatan juga bersifat pelayanan perseorangan berupa pelayanan kesehatan yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, termasuk obat dan bahan medis habis pakai yang diperlukan dalam mencapai pelayanan dan penyelenggaraan yang baik.

Menurut Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), BPJS Kesehatan merupakan penyelenggara program jaminan sosial di bidang kesehatan yang merupakan salah satu dari lima program dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yaitu diantaranya Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

BPJS Kesehatan bersama BPJS Ketenagakerjaan (dahulu bernama Jamsostek) merupakan program pemerintah dalam kesatuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diresmikan pada tanggal 31 Desember 2013. Untuk BPJS Kesehatan mulai beroperasi sejak tanggal 1 Januari 2014 sedangkan BPJS Ketenagakerjaan mulai beroperasi sejak 1 Juli 2014. BPJS Kesehatan juga menjalankan fungsi pemerintahan (*governing function*) di bidang pelayanan umum (*public services*) yang sebelumnya sebagian dijalankan oleh BUMN dan sebagian lainnya oleh lembaga pemerintahan. BPJS Kesehatan juga dibentuk dengan modal awal dibiayai dari APBN dan selanjutnya memiliki kekayaan tersendiri yang meliputi aset BPJS Kesehatan dan aset dana jaminan sosial dari sumber-sumber sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. BPJS Kesehatan merupakan salah satu bentuk Badan Hukum Milik Negara (BHMN) sehingga pelaksanaan tugasnya dipertanggungjawabkan kepada Presiden sebagai kepala pemerintahan negara untuk hal kepesertaan setiap warga negara Indonesia dan

warga asing yang sudah bekerja di Indonesia selama minimal enam bulan wajib menjadi anggota BPJS.

Menurut UU BPJS Pasal 14, “Setiap perusahaan wajib mendaftarkan pekerjanya sebagai anggota BPJS, Sedangkan orang atau keluarga yang tidak bekerja pada perusahaan wajib mendaftarkan diri dan anggota keluarganya pada BPJS Setiap peserta BPJS akan ditarik iuran yang besarnya ditentukan kemudian Sedangkan bagi warga miskin iuran BPJS ditanggung pemerintah melalui program Bantuan Iuran menjadi peserta BPJS tidak hanya wajib bagi pekerja di sektor formal, namun juga pekerja informal Pekerja informal juga wajib menjadi anggota BPJS Kesehatan Para pekerja wajib mendaftarkan dirinya dan membayar iuran sesuai dengan tingkatan manfaat yang diinginkan Jaminan kesehatan secara universal diharapkan bisa dimulai secara bertahap pada 2014 dan pada 2019 diharapkan seluruh warga Indonesia sudah memiliki jaminan kesehatan tersebut. Menurut Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi (2014), “BPJS Kesehatan akan diupayakan untuk menanggung segala jenis penyakit namun dengan melakukan upaya efisiensi” Sedangkan dalam data lapangan yang dimiliki di PT.PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan ada jaminan kesehatan selain BPJS yaitu Program Penyelenggaraan kesehatan PLN dikutip langsung dari Junior Officer Remunerasi Dan Benefit PT.PLN (Persero) UIKSBS (2019) “Seluruh aturan kepegawaian tentang BPJS kita ikuti dan juga sudah didaftarkan semua sehingga tidak ada yang bertentangan kita diberi kebebasan untuk melaksanakan program tersebut secara otonom kita dibebaskan juga untuk menggunakan program kesehatan PLN atau BPJS Kesehatan”

Berikut data Kepegawaiaan PT. PLN (Persero) yang terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan sekaligus Program penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan PT.PLN (Persero) dijelaskan dalam tabel 1 sebagai berikut.

Tabel 1

Daftar Seluruh Karyawan PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan (UIKSBS) Berdasarkan Tempat Tugas 05 April 2019

No	Tempat Tugas	Jumlah Seluruh
1.	UIK SBS	157
2.	UPK Keramasan	155
3.	UPDK Bandar Lampung	150
4.	UPK Bukit Asam	149
5.	UPDK Bengkulu	76
6.	UPK Bukittinggi	94
7.	UPK Ombilin	113
8.	UPK Tarahan	118
9.	UPDK Jambi	84
10.	UPK Teluk Sirih	144
11.	UPK Sebalang	143
	Jumlah	1383

Sumber: PT.PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan Tahun 2020

Dan berikut data anggota keluarga dan pensiunan yang ditanggung oleh PT.PLN (Persero) Unit Induk pembangkitan Sumatera bagian selatan dijelaskan dalam tabel 2 sebagai berikut.

Tabel 2

**Daftar Seluruh Anggota Keluarga dan Pensiunan Berdasarkan Tempat Tugas
Pegawai Tetap 05 April 2019**

No	Tempat Tugas	Jumlah Seluruh
1.	UIK SBS	390
2.	UPK Keramasan	371
3.	UPDK Bandar Lampung	401
4.	UPK Bukit Asam	353
5.	UPDK Bengkulu	141
6.	UPK Bukittinggi	143
7.	UPK Ombilin	172
8.	UPK Tarahan	183
9.	UPDK Jambi	149
10.	UPK Teluk Sirih	296
11.	UPK Sebalang	312
	Jumlah	2911

Sumber: PT.PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan Tahun 2020

Kemudian dalam program Penyelenggaraan Kesehatan PLN yang dalam hal ini sebagai Penyediaan pemeliharaan kesehatan bagi Pegawai oleh perusahaan dimaksudkan untuk menjaga, memelihara dan meningkatkan kesehatan Pegawai, Pensiunan dan keluarganya.

Berdasarkan Keputusan Direksi No. 168.K/DIR/2011, tanggal 10 November 2011 tentang pemeliharaan kesehatan pegawai PT.PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Sumatera bagian selatan secara tetap dapat menyelenggarakan program penyelenggaraan kesehatan tanpa harus bertentangan dengan aturan BPJS ketenagakerjaan serta aturan pemerintah dengan tujuan pelaksanaannya sendiri dengan pemberian pemeliharaan kesehatan

adalah untuk meningkatkan kejujuran dalam memanfaatkan fasilitas pemeliharaan kesehatan, mendidik pegawai agar sadar biaya dan terjaganya kondisi kesehatan dan kualitas hidup pegawai merupakan salah satu faktor penunjang keberhasilan kegiatan operasional dan terselenggaranya proses bisnis PT.PLN (Persero) dengan baik. Guna mempermudah perusahaan dalam memantau kesehatan setiap anggota perusahaannya, kini PLN mulai menerapkan program pemeliharaan kesehatan sistem online untuk merekam riwayat kesehatan pegawai Dengan sistem ini PLN secara real time dapat mengakses data kesehatan pegawai dan keluarga pegawai terdaftar.

Peningkatan biaya kesehatan ini disatu sisi sering dirasakan oleh PT.PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan, Besarnya beban pembiayaan kesehatan merupakan beban yang harus ditanggung sendiri oleh PT.PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan. Terdapat aturan prosedural yang harus dipahami pegawai sebagai implementor kebijakan yang ada terutama Surat Edaran NOMOR-0001.E/GM-KITSBS/2016 serta Surat Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 168.K/DIR/2011.

Karyawan tentu perlu memahami standar prosedur pelayanan kesehatan yang diterapkan oleh PT.PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan dengan lebih baik agar terdapat langkah langkah kerja yang baik dengan itu perlu adanya langkah-langkah kerja yang tertib ini disebut SOP (standard operasional prosedur).

Menurut Atmoko Tjipto dalam buku standart operasional prosedur dan dan akuntabilitas kerja (2010:21)

“Standard Operasional Prosedur (SOP) adalah proses standar langkah - langkah sejumlah instruksi logis yang harus dilakukan berupa aktivitas, aliran data, dan aliran kerja yang teratur, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan, menggambarkan bagaimana tujuan pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku, menjelaskan bagaimana proses pelaksanaan kegiatan berlangsung, sebagai sarana tata urutan dari pelaksanaan dan pengadministrasian pekerjaan harian sebagaimana metode yang ditetapkan. menjamin konsistensi dan proses kerja yang sistematis, dan menetapkan hubungan timbal balik antar Satuan Kerja.”

Dalam pelaksanaan SOP pada PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan yang dalam hal ini tertuang di dalam Surat Edaran NOMOR-0001.E/GM-KITSBS/2016 sesuai dengan pengamatan dalam penelitian di lapangan baik secara wawancara maupun pengamatan langsung ketika kegiatan Kuliah Kerja Administrasi (KKA) di instansi PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan perlu adanya penelitian lebih lanjut terhadap isi kebijakan tersebut agar dapat menjadi bahan evaluasi yang sesuai dengan aturan kebijakan publik yang baik.

Berdasarkan beberapa uraian tersebut karena dirasakan ada kebijakan dan aturan yang perlu di lihat dalam lingkup penelitian lebih lanjut di PT.PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan selama melaksanakan KKA di instansi terkait maka dari itu peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian mengenai “Implementasi kebijakan Penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan di PT.PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Sumatera bagian Selatan “

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Implementasi kebijakan Penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan di PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Sumatera Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi kebijakan Penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan di PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti diharapkan dapat bermanfaat dalam pemahaman di bidang studi Administrasi publik terutama bagian kebijakan publik, khususnya juga hal-hal yang berkaitan dengan masalah standar operasional prosedur yang diterapkan perusahaan.
2. Bagi perusahaan:
 - a. Sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang diterapkan oleh perusahaan.
 - b. Peneliti dapat memberikan saran-saran yang dapat dijadikan tolak ukur dan bahan pertimbangan di dalam menyusun rencana selanjutnya.

Daftar Pustaka

- Kesehatan, Dan perancangan system informasi (2018). *Perancangan Sistem Informasi Manajemen Restitusi*. 5(1), 35–40. <https://doi.org/10.25126/jtiik.201851539>
- Suparno. (2017). *Implementasi Kebijakan Publik Dalam Praktek*. 7–14.
- Muadi, & Sofwani, A. (2018). Konsep Dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik. *Jurnal Review Politik*, 6(2), 195–224. Di dapat dalam <http://jurnalpolitik.uinsby.ac.id/index.php/jrp/article/view/90>
- Dhika Dadi Pawesti Putri dalam *Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran* (2015).
- Akib H. (2012). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa dan Bagaimana. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*. <https://doi.org/10.26858/jiap.v1i1.289>
- Hamilton, W., Policy, P., Friedricht, C. J., & Mason, E. S. (1942). *Professor of Government, Harvard University. t Professor of Economics, Harvard University, on leave to Office of Coordinator of In- formation, Washington, D.C.*
- Anderson, J. E. (2003). Public policymaking: an introduction. In *Public policy making: an introduction*.
- Depkes RI, & RI, D. (2013). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional. *Peraturan Menteri Kesehatan*. <https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2>
- Agustino, Leo. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung. Alfabeta
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Nadzir, Muhammad, *Metode Penelitian, Indonesia: Ghalia Indonesia*, 2003
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya